

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

**COLLABORATIVE GOVERNANCE PEMERINTAH DAERAH
DENGAN KODIM 0508/DEPOK DALAM SINKRONISASI PERENCANAAN
WILAYAH DI KOTA DEPOK**

Ferhartz Rizkyansah¹

Dadan Kurnia²

Titin Rohayatin³

1,2,3) Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Fisip Unjani

Email Korespondensi : ferhartz2011@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tata kelola kolaboratif antara Pemerintah Daerah dengan Kodim 0508/Depok dalam Sinkronisasi Perencanaan Daerah di Kota Depok. Pertanyaan yang diajukan berkaitan dengan bagaimana tata kelola kolaboratif antara Pemerintah Daerah dengan Kodim 0508/Depok dalam menyelaraskan perencanaan daerah di Kota Depok.

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dan studi lapangan. Teknik analisis data melalui studi lapangan melalui wawancara dan observasi. Teknik pengambilan sampel adalah purposive sampling, dengan 3 informan, ASN Bappeda Kota Depok, Kepala Dinas Penataan Ruang dan Permukiman Kota Depok, dan Dandim 0508/Depok. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kolaborasi antara Pemerintah Daerah dan Kodim 0508/Depok dalam menyelaraskan perencanaan daerah di Kota Depok adalah langkah yang tepat untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan terkoordinasi.

Dengan bekerja sama, kedua belah pihak dapat memaksimalkan sumber daya yang mereka miliki untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Depok secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting bagi Pemerintah Daerah dan Kodim 0508/Depok untuk terus menjalin kolaborasi yang baik dan berkelanjutan guna menciptakan Kota Depok yang lebih baik di masa depan.

Kata kunci: tata kelola kolaboratif, Pemerintah Daerah, Kodim 0508/Depok, Perencanaan Wilayah

Abstract

This research is intended to examine the collaborative governance of the Regional Government with Kodim 0508/Depok in the Synchronization of Regional

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

Planning in Depok City. The question asked relates to how collaborative governance of the Regional Government with Kodim 0508/Depok is in synchronizing regional planning in Depok City. The research method used is descriptive with a qualitative approach. Data collection techniques through library studies and field studies. Data analysis techniques through field studies through interviews and observations. The sampling technique was purposive sampling, with 3 informants, ASN Bappeda Depok City, Head of the Depok City Spatial Planning and Settlement Service, and Dandim 0508/Depok.

The results of this research indicate that collaboration between the Regional Government and Kodim 0508/Depok in synchronizing regional planning in Depok City is the right step to achieve sustainable and coordinated development. By working together, both parties can maximize the resources they have to improve the quality of life of the people of Depok City as a whole. Therefore, it is important for the Regional Government and Kodim 0508/Depok to continue to establish good and sustainable collaboration in order to create a better Depok City in the future.

Keywords: *collaborative governance, Regional Government, Kodim 0508/Depok, Regional Planning*

PENDAHULUAN

Perencanaan wilayah merupakan rangkaian proses dari perencanaan pembangunan yang dimaksudkan untuk melakukan perubahan menuju arah perkembangan yang lebih baik bagi suatu komunitas masyarakat, pemerintah, dan lingkungannya dalam wilayah tertentu, dengan memanfaatkan atau mendayagunakan berbagai sumber daya yang ada, dan harus memiliki orientasi yang bersifat menyeluruh, lengkap, tetap berpegang pada azas prioritas. (Riyadi dan Bratakusumah, 2003) Pelaksanaan perencanaan ruang wilayah ini disinonimkan dengan hasil akhir yang hendak dicapai, yaitu tata ruang.

Penyelenggaraan penataan ruang sendiri memiliki tujuan yaitu untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Selain itu, penataan ruang diharapkan dapat mengefisiensikan pembangunan dan meminimalisasi konflik kepentingan dalam pemanfaatan ruang serta meminimalisasi dampak bencana yang akan muncul seperti banjir, tanah longsor,

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

dan penurunan kualitas lingkungan penduduk terutama di perkotaan akibat ketidaksesuaian penggunaan lahan dengan rencana tata ruang (Pemendagri No. 28, 2008)

Pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah tidak hanya berfokus pada sumber daya manusia dan ekonomi saja, namun juga perlu diiringi dengan perencanaan pembangunan fisik yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat suatu daerah. Perencanaan pembangunan ini dimaksudkan untuk melihat pemanfaatan ruang serta interaksi berbagai kegiatan dalam ruang wilayah sehingga terlihat perbedaan fungsi ruang yang satu dengan yang lainnya.

Perencanaan pembangunan juga memperhatikan interaksi antar ruang untuk diarahkan kepada tercapainya kehidupan yang efisien, nyaman dan bermanfaat. Pembangunan wilayah memiliki peranan penting dalam mempengaruhi pembangunan skala nasional. Perencanaan pembangunan kota yang optimal yaitu bila melihat potensi kota agar suatu wilayah dapat tumbuh dan berkembang sesuai kebutuhan masyarakatnya serta dapat mengurangi dampak buruk yang mengganggu. Dampak buruk tersebut dapat berupa meningkatnya polusi udara, pencemaran air, kebisingan, sampah dan dampak sosial lingkungan lainnya. Selain itu pembangunan sebuah wilayah akan cepat berkembang bila didukung infrastruktur dan sistem jaringan yang memadai di wilayah tersebut. Dengan adanya otonomi daerah, setiap wilayah diberikan wewenang untuk mengembangkan daerahnya dan menggali potensi yang ada.

Pemilihan metode penelitian yang tepat merupakan langkah penting dalam menjalankan sebuah penelitian. Penelitian ini menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode penelitian deskriptif merupakan salah satu cara guna mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti atau suatu cara dalam meneliti permasalahan dengan cara menggambarkan atau menjelaskan fenomena pada masa sekarang yang terjadi sesuai dengan fakta yang ada

Received : 22 Okt 2024

Accepted : 22 Okt 2024

Published : 22 Okt 2024

di lapangan, agar dapat menghasilkan data berupa kata-kata tertulis dan lisan. Keadaan dan kondisi yang didapatkan dari sekelompok manusia yang diamati, gambar atau foto, dokumen resmi serta catatan wawancara. Sehingga memudahkan peneliti untuk mendapatkan data objektif dalam rangka mengetahui dan memahami *Collaborative Governance* Pemerintah Daerah Dengan Kodim 0508 Dalam Sinkronisasi Perencanaan Wilayah di Kota Depok. Hal ini sejalan dengan pendapat Moleong (dalam Subagyo, 2023) yang menyatakan bahwa Dengan kata lain, penelitian ini disebut penelitian kualitatif karena merupakan penelitian yang tidak mengadakan perhitungan.

KERANGKA TEORI

Perencanaan wilayah adalah suatu proses perencanaan pembangunan yang dimaksudkan untuk melakukan perubahan menuju arah perkembangan yang lebih baik bagi suatu komunitas masyarakat, pemerintah, dan lingkungannya dalam wilayah tertentu, dengan memanfaatkan atau mendayagunakan berbagai sumber daya yang ada, dan harus memiliki orientasi yang bersifat menyeluruh, lengkap, tetap berpegang pada azas prioritas. Pelaksanaan perencanaan ruang wilayah ini disinonimkan dengan hasil akhir yang hendak dicapai, yaitu tata ruang. Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Selain itu, penataan ruang diharapkan dapat mendukung pada perwujudan tujuan negara yang salah satunya dilaksanakan oleh lembaga pertahanan negara TNI-AD.

Oleh karena itu, perencanaan wilayah yang dilaksanakan oleh Pemda perlu sinkron dengan perencanaan wilayah pertahanan oleh TNI AD melalui satuan di bawahnya. Sinkronisasi perencanaan hanya akan terwujud apabila dibangun dengan kerjasama yang baik antara Pemda dengan Kodim. Guna mengukur pelaksanaan kerjasama Pemda dengan Kodim dalam sinkronisasi perencanaan wilayah, peneliti menggunakan teori menurut Tirrel & Clay (2010) mengkonsepkan bahwa dalam

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

kolaborasi terjadi transisi aktifitas yang dibagi menjadi 5 (lima) tahapan dirangkum mulai dari level terendah sampai level tertinggi. Pemilihan teori ini dikarenakan indikator yang dipaparkan dinilai telah mencakup seluruh tahapan pelaksanaan kolaborasi.

1. Eksplorasi. Pada tahap ini terjadi pertemuan antara pihak yang berkepentingan dapat dilakukan secara formal maupun informal seperti pertemuan dalam bentuk penyampaian pendapat, rapat, pembagian informasi, dan diskusi mengenai peninjauan opini.
2. Formasi. Pada tahap ini kolaborasi sudah terjadi. Kreasi dan persetujuan mulai terlihat prosedur dan struktur operasional dikembangkan. Selain itu tujuan juga telah dirumuskan dan aksi bersama dikembangkan.
3. Tumbuh. Pada tahap ini pengaturan terhadap prioritas dan perencanaan ditekankan, proses operasional dirutinkan. Kemudian telah dilakukan upaya untuk memperjuangkan konsensus, formulasi, dan implementasi.
4. Dewasa. Tahap ini sudah masuk dalam tingkatan pengembangan. Dana partisipasi dan akses stabil. Semua strategi didesain dengan basis berkelanjutan. Hasil kolaborasi dibagi kepada semua pihak dan tujuan kolaborasi dinilai.
5. Akhir. Pada tahap terakhir ini, kolaborasi sudah bekerja secara ideal dan sempurna. Ada kepuasan dari masing-masing pihak atas hasil yang dilakukan. Kolaborasi sukses menyelesaikan masalah ketika terjadi penurunan, sehingga dilakukannya pembaruan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan penelitian kualitatif sedangkan penelitian ini disajikan melalui pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilaksanakan melalui beberapa proses hingga diperoleh data yang valid dan dianggap sudah memenuhi syarat untuk menjelaskan seluruh proses penelitian ini. Beberapa

Received : 22 Okt 2024

Accepted : 22 Okt 2024

Published : 22 Okt 2024

proses dalam pengumpulan data dalam penelitian ini seperti Reduksi data merupakan kegiatan merangkum catatan-catatan lapangan dengan memilih hal-hal pokok yang berhubungan dengan permasalahan penelitian, rangkuman catatan-catatan lapangan itu kemudian disusun secara sistematis agar memberikan gambaran yang lebih tajam serta mempermudah pelacakan kembali apabila sewaktu-waktu data diperlukan kembali. Peneliti menggunakan reduksi data dengan tujuan memudahkan dalam pengumpulan data di lapangan yang berkaitan dengan *Collaborative Governance* Pemerintah Daerah Dengan Kodim 0508 Dalam Sinkronisasi Perencanaan Wilayah di Kota Depok.

Setelah proses tersebut dilaksanakan maka data penelitian tersebut disajikan beberapa proses sebagai berikut :

1. Display Data.

Display data berguna untuk melihat gambaran keseluruhan hasil penelitian, baik yang terbentuk matriks atau pengkodean, dari hasil reduksi data dan display data itulah selanjutnya peneliti dapat menarik kesimpulan data memverifikasi sehingga menjadi kebermaknaan data. Peneliti menggunakan display data ini untuk melihat gambaran penelitian.

2. Kesimpulan dan Verifikasi.

Untuk menetapkan kesimpulan yang lebih beralasan dan tidak lagi berbentuk kesimpulan yang coba-coba, maka verifikasi dilakukan sepanjang penelitian berlangsung sejalan dengan membercheck, triangulasi dan audit trail, sehingga menjamin signifikansi atau kebermaknaan hasil penelitian. Peneliti menggunakan metode ini untuk memverifikasi kesimpulan yang jelas dan pasti.

PEMBAHASAN

Tugas dan Tanggung Jawab

1. Kodim 0508/Depok menyelenggarakan :

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

-
- a. Pembinaan kesiapan jajarannya, membina teritorial, perlawanan rakyat serta melaksanakan Ops Haneg di daerah sesuai dengan kebijaksanaan Pangdam Jaya dan Danrem 051/Wijayakarta.
 - b. Pembinaan keamanan daerah, serta memberikan bantuan dan koordinasi terhadap unsur - unsur yang bertanggung jawab untuk pengamanan Instansi, Obyek Vital milik TNI, Pemerintah dan Swasta, pengamanan fisik pejabat penting Negara dan Tamu Negara serta Pejabat perwakilan Negara Asing (Duta / atase Negara Asing) yang berada di Wilayah sesuai petunjuk Pangdam Jaya dan Danrem 051/Wijayakarta.
 - c. Pembinaan Bin Komsos yang sasarannya meliputi Appem, Kommas dan Keluarga besar TNI di daerah dalam rangka menunjang Pembangunan di daerah dan untuk kepentingan Haneg.
 - d. Pengurusan bantuan administrasi terhadap Satuan/ Badan/ Komando yang ada di daerah.
 - e. Fungsi kegarizunan TNI di daerah sesuai dengan kebijaksanaan Komando Atas.
 - f. Tugas - tugas lain yang dibebankan oleh Pangdam / Dan Rem, baik secara berdiri sendiri atau dengan perkuatan dari komando Atas.

2. Fungsi Utama.

- a. Pembinaan Teritorial. Menyelenggarakan segala usaha, kegiatan dan pekerjaan yang berkenaan dengan perencanaan, penyusunan dan pengendalian kegiatan serta Binter untuk menyiapkan ruang, alat dan kondisi juang serta kemampuan perlawanan Wilayah.
- b. Pembinaan TNI sebagai kekuatan Sosial. Menyelenggarakan segala usaha, kegiatan dan pekerjaan yang berkenaan perencanaan, penyusunan dan pengendalian TNI sebagai kekuatan sosial di daerah.
- c. Kegarnizunan. Menyelenggarakan segala usaha, kegiatan dan pekerjaan yang berkenaan tertib, hukum dan pengamanan / ketertiban serta protokoler Militer /

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

TNI.

3. Fungsi Organik Militer

- a. Intelijen Teritorial. Menyelenggarakan segala usaha, kegiatan dan pekerjaan yang berkenaan dengan Intelijen Teritorial yang meliputi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan terbatas.
- b. Operasi Teritorial. Menyelenggarakan segala usaha, kegiatan dan pekerjaan yang berkenaan dengan penyiapan dan penyusunan serta penyelenggaraan operasi pembinaan teritorial.
- c. Latihan. Menyelenggarakan segala usaha, kegiatan dan pekerjaan yang berkenaan dengan peningkatan dan pemeliharaan kemampuan perorangan dan kelompok.

Permasalahan Menonjol Kodim 0508/Depok

1. Bidang Geografi. Terdapatnya perubahan Kondisi SDA / SDB terutama di daerah lahan produktif sebagai akibat adanya pembangunan fisik dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat, kenyataannya akan berpengaruh terhadap tingkat perubahan, akan tetapi produksi hasil pengolahan bidang SDA / SDB dari waktu ke waktu akan mengalami kenaikan dengan adanya insus bidang pertanian. Pemanfaatan SDA dan pelestarian lingkungan hidup yang dimiliki Kab Cianjur merupakan sumber potensi yang dapat dimanfaatkan sebesar -besarnya bagi kesejahteraan rakyat yang pada akhirnya merupakan sumber kekuatan bagi kepentingan pertahanan negara. Sasaran Binter : Pembuatan jalan tembus antara desa dan Kecamatan; Pengerasan jalan desa yang menghubungkan antara desa dan kecamatan.
2. Bidang Demografi. Jumlah penduduk berdasarkan data terakhir berjumlah 2.410.131 jiwa. Hal ini belum merupakan suatu ancaman bagi daerah Kota Depok, untuk dapat dikendalikan pada tingkat kewajaran. Penyiapan rakyat terlatih yang sudah diorganisir, dilengkapi dan dilatih untuk disiagakan. Sasaran

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

binter dalam rangka menambah jumlah Wanra di koramil dan Kodim. Mengadakan pelatihan - pelatihan menghadapi bahaya kebakaran diwilayah koramil.

Wilayah menjadi unsur yang vital/utama bagi berdirinya sebuah negara, hal ini berhubungan dengan integrasi yang dilakukan oleh negara demi mencapai persatuan yang kuat. Integrasi secara etimologis dapat didefinisikan sebagai proses pembentukan bagian-bagian/unit-unit menjadi satu kesatuan. Ada dua macam integrasi yang harus dipenuhi oleh sebuah negara yaitu intergrasi politik dan intergrasi wilayah dimana integrasi politik adalah persatuan dari seluruh lembaga politik yang berada dalam negara tersebut dalam menjalankan pemerintahan serta kehidupan berbangsa dan bernegara, sedangkan integrasi teritorial berkaitan dengan kedaulatan wilayah yang dimiliki oleh negara yang bersangkutan mencakup wilayah daratan, perairan dan udara. Dimana pada wilayah ini merupakan tempat bermukim dari penduduk serta berlangsungnya kegiatan administratif pemerintahan negara. "Wilayah merupakan aspek penting dalam pengakuan atas suatu negara secara de facto" dimana sebuah negara akan diakui eksistensinya apabila ia telah mempunyai sebuah wilayah yang secara definitif ditempati oleh bangsa yang bersangkutan sebagai berlangsungnya kegiatan pemerintahan negara tersebut.

Pada era Otonomi Daerah saat sekarang ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya, dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan rumah tangganya. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Penyelenggaraan otonomi daerah juga harus menjamin keserasian hubungan antar daerah dengan daerah lainnya.

Received : 22 Okt 2024

Accepted : 22 Okt 2024

Published : 22 Okt 2024

Artinya, mampu membangun kerjasama antar daerah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar daerah. Selain itu otonomi daerah juga harus mampu menjamin hubungan yang serasi antar daerah dengan pemerintah, artinya harus mampu memelihara dan menjaga keutuhan wilayah negara dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Collaborative Governance Pemerintah Daerah dengan Kodim 0508/Depok Dalam Sinkronisasi Perencanaan wilayah di Kota Depok

Collaborative governance adalah suatu pendekatan yang melibatkan pihak-pihak yang berbeda untuk bekerja sama dalam mengambil keputusan dan memecahkan masalah bersama. Pemerintah daerah dan militer, dalam hal ini Kodim 0508/Depok, merupakan dua pihak yang memiliki peran penting dalam menjalankan tugas-tugasnya masing-masing. Di Kota Depok, keterlibatan Kodim 0508/Depok dalam perencanaan wilayah dapat menjadi salah satu langkah penting dalam meningkatkan sinergi antara pemerintah daerah dan militer.

Pemilihan teori ini dikarenakan indikator yang dipaparkan dinilai telah mencakup seluruh tahapan pelaksanaan kolaborasi, yaitu:

1. Eksplorasi. Pada tahap ini terjadi pertemuan antara pihak yang berkepentingan dapat dilakukan secara formal maupun informal seperti pertemuan dalam bentuk penyampaian pendapat, rapat, pembagian informasi, dan diskusi mengenai peninjauan opini.
2. Formasi. Pada tahap ini kolaborasi sudah terjadi. Kreasi dan persetujuan mulai terlihat prosedur dan struktur operasional dikembangkan. Selain itu tujuan juga telah dirumuskan dan aksi bersama dikembangkan.
3. Tumbuh. Pada tahap ini pengaturan terhadap prioritas dan perencanaan ditekankan, proses operasional dirutinkan. Kemudian telah dilakukan upaya untuk memperjuangkan konsensus, formulasi, dan implementasi.
4. Dewasa. Tahap ini sudah masuk dalam tingkatan pengembangan. Dana partisipasi

Received : 22 Okt 2024

Accepted : 22 Okt 2024

Published : 22 Okt 2024

dan akses stabil. Semua strategi didesain dengan basis berkelanjutan. Hasil kolaborasi dibagi kepada semua pihak dan tujuan kolaborasi dinilai.

5. Akhir. Pada tahap terakhir ini, kolaborasi sudah bekerja secara ideal dan sempurna.

Ada kepuasan dari masing-masing pihak atas hasil yang dilakukan. Kolaborasi sukses menyelesaikan masalah ketika terjadi penurunan, sehingga dilakukannya pembaruan.

Kolaborasi antara Pemerintah Daerah dengan Kodim 0508 dalam sinkronisasi perencanaan wilayah di Kota Depok merupakan hal yang sangat penting untuk menjaga keberlangsungan pembangunan kota tersebut. Dalam kolaborasi ini, terdapat dimensi eksplorasi yang memungkinkan adanya pertemuan antara pihak yang berkepentingan, baik secara formal maupun informal.

Dengan adanya kolaborasi yang baik antara Pemerintah Daerah dengan Kodim 0508 dalam sinkronisasi perencanaan wilayah di Kota Depok, diharapkan pembangunan kota tersebut dapat berjalan dengan lebih efisien dan efektif. Melalui dimensi eksplorasi dalam kolaborasi ini, para pihak dapat saling berinteraksi, saling mendengarkan, serta mencari solusi bersama untuk memastikan pembangunan Kota Depok dapat berjalan sesuai rencana dan dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.

Hambatan dan upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan *Collaborative Governance* Pemerintah Daerah dengan Kodim 0508/Depok Dalam Sinkronisasi Perencanaan wilayah di Kota Depok

Pemerintah daerah dan Kodim 0508/Depok memiliki peran yang penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Kota Depok. Namun, selain itu, keduanya juga harus bekerja sama dalam hal perencanaan wilayah untuk memastikan pembangunan berjalan dengan baik dan terkoordinasi. Kolaborasi antara pemerintah daerah dan Kodim 0508/Depok dalam sinkronisasi perencanaan wilayah di Kota Depok sangatlah penting untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam perencanaan dan pengembangan wilayah Kota Depok,

Received : 22 Okt 2024

Accepted : 22 Okt 2024

Published : 22 Okt 2024

sedangkan Kodim 0508/Depok memiliki peran sebagai unsur dalam keamanan dan pertahanan negara.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan tersebut, maka dapat ditarik benang merah kesimpulan sebagai berikut:

Kesimpulan berdasarkan pembahasan ke lima dimensi, ialah:

1. Dimensi ekspolrasi, dimensi eksplorasi telah berhasil menciptakan lingkungan yang kondusif untuk kerjasama lebih lanjut. Komunikasi yang terbuka dan saling menghargai ini akan membantu Pemda dan Kodim untuk menyelaraskan program-program mereka dan mencapai tujuan bersama dalam pembangunan Kota Depok khususnya dalam perencanaan RTRW dan Wilayah Pertahanan Kota Depok.
2. Dimensi Formasi, dimensi formasi ini menunjukkan adanya komitmen dan kesiapan dari kedua belah pihak untuk melaksanakan kerjasama secara terstruktur dan terarah. Adanya kesepakatan bersama yang kokoh dan pemahaman yang sama tentang tujuan kerjasama menjadi landasan yang kuat untuk memasuki tahap implementasi kerjasama.
3. Dimensi Tumbuh, adanya mekanisme pemantauan dan evaluasi yang jelas dan terstruktur menunjukkan komitmen kedua belah pihak dalam menjaga keberlanjutan dan efektivitas kerjasama. Pembentukan tim khusus yang terdiri dari perwakilan Pemda dan Kodim, sistem pelaporan internal Kodim, serta pemantauan aktif dari Dinas Tata Ruang dan Permukiman, semuanya merupakan indikator positif adanya upaya untuk terus mengembangkan dan meningkatkan kerjasama.
4. Dimensi Dewasa, dimensi Dewasa mencerminkan bahwa kerjasama antara Pemda dan Kodim telah mencapai tahap yang matang dan stabil, dengan adanya kesadaran bersama akan pentingnya kerjasama ini bagi pembangunan Kota Depok, serta kesiapan untuk terus mengembangkan dan memperkuat kerjasama ini di masa

Received : 22 Okt 2024

Accepted : 22 Okt 2024

Published : 22 Okt 2024

depan.

5. Dimensi Akhir, dapat ditarik kesimpulan bahwa kerjasama antara Pemda dan Kodim Kota Depok memiliki dimensi "Akhir" yang positif, ditandai dengan adanya mekanisme umpan balik dan refleksi yang kuat. Semua pihak, termasuk Bappeda, Dinas Tata Ruang dan Permukiman, serta Kodim 0508/Depok, secara aktif melakukan evaluasi dan refleksi, baik secara internal maupun bersama-sama.

Hambatan dalam *collaborative governance* antara Pemerintah Daerah dengan Kodim 0508/Depok, diantaranya:

1. Salah satu hambatan utama dalam *collaborative governance* antara Pemerintah Daerah dengan Kodim 0508/Depok adalah kurangnya koordinasi dan komunikasi yang efektif antara kedua pihak. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya kesalahpahaman, ketidaksesuaian dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek pembangunan, serta potensi konflik antara kedua pihak. Kedua, perbedaan visi dan misi dalam pengelolaan wilayah juga menjadi hambatan yang sering muncul dalam kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan Kodim 0508/Depok.

Untuk mengatasi hambatan tersebut, beberapa upaya perlu dilakukan, seperti:

1. Pertama, perlu adanya pembentukan mekanisme koordinasi yang efektif antara Pemerintah Daerah dengan Kodim 0508/Depok. Mekanisme koordinasi ini dapat berupa rapat-rapat koordinasi rutin, pembentukan tim kerja bersama antara kedua pihak, atau pembentukan forum diskusi yang melibatkan seluruh *stakeholders* terkait perencanaan wilayah di Kota Depok. Dengan adanya mekanisme koordinasi yang jelas dan efektif, diharapkan akan tercipta keberlangsungan komunikasi yang baik antara Pemerintah Daerah dan Kodim 0508/Depok.
2. Kedua, pelibatan masyarakat dan stakeholders lainnya juga perlu diperkuat dalam *collaborative governance* antara Pemerintah Daerah dengan Kodim 0508/Depok.

*Received : 22 Okt 2024**Accepted : 22 Okt 2024**Published : 22 Okt 2024*

Dengan melibatkan masyarakat dan *stakeholders* lainnya dalam proses perencanaan wilayah, diharapkan kebijakan yang dihasilkan akan lebih sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

3. Terakhir, peningkatan kapasitas dan pemahaman tentang *collaborative governance* juga menjadi hal yang penting dalam mengatasi hambatan dalam kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan Kodim 0508/Depok. Dengan adanya peningkatan kapasitas dan pemahaman yang baik, diharapkan akan terbentuk sinergi yang kuat antara kedua pihak dalam merumuskan strategi perencanaan wilayah yang lebih efektif dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyani. 2012. Sosiologi: Skematika, Teori, dan Terapan. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Azwar. Widjaja. 2009. Perencanaan Sebagai Fungsi Manajemen. Jakarta: Penerbit PT. Rineka Cipta.
- Budiman, 2003, Peningkatan Pembinaan Teritorial di Wilayah Korem 121/ABW dihadapkan dengan Tantangan Kewilayahan, Spersad, Jakarta.
- Budiyanto, Rachmat, 2009, Peningkatan Bidang Pertahanan dan Keamanan dalam Sishankamrata Guna Ketahanan Nasional, Lemhannas, Jakarta.
- Buku Putih Pertahanan RI, Departemen Pertahanan RI, Jakarta, 2003.
- Danpusterad, 2011, Bahan Seminar Nasional Teritorial: Berbagai Permasalahan Teritorial dalam Pelaksanaannya di Lapangan.
- Emily R. Lai. 2011. Collaborations: A Literature Review, Pearson.
- Moleong, L. J. 2017. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja. Rosdakarya.
- Mulyono. 2019. Optimalisasi Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Dalam Rangka Mendukung Sistem Pertahanan Semesta, Jurnal Yudhagama, Vol. 1, No. 245, Tahun 2009.
- R Herlambang Perdana Wiratraman. 2007. Good governance and legal reform in Indonesia,(Office of Human Rights Studies and Social Development, Mahidol University, 2007).
- Ritohardoyo, S, 2002, "Penggunaan dan Tata Guna Lahan", Fakultas Geografi, UGM: Yogyakarta.
- Suharsimi Arikunto. 1998. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Susan, Novri. 2009. Pengantar Sosiologi Konflik dan Isu-isu konflik

Received : 22 Okt 2024

Accepted : 22 Okt 2024

Published : 22 Okt 2024

kontemporer. Jakarta: Prenada Media.

Ulber Silalahi. 2011. Asas-Asas Manajemen. Bandung. Refika Aditama. Undang Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok Tahun 2022 – 2042.

Bujukin tentang Binter Surat Keputusan Kasad Nomor Skep 98/V/2007.

Bujuknik tentang Sikap Teritorial Surat Keputusan Kasad Nomor Skep 511/XII/2004.

Bujuknik tentang Lima Kemampuan Teritorial Surat Keputusan Kasad Nomor Skep 508/XII/2003.